

**Judul** : KPK makin sering gelar OTT, Komisi III: Bukti komitmen berantas perilaku korupsi  
**Tanggal** : Minggu, 08 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

KPK Makin Sering Gelar OTT

## Komisi III: Bukti Komitmen Berantas Perilaku Korupsi

SENAYAN mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat negara, mulai dari hakim, petugas pajak, hingga pejabat Bea dan Cukai.

Anggota Komisi III DPR Nyoman Parta mengatakan, lembaga penegak hukum itu sebelumnya telah melakukan upaya pencegahan, sosialisasi penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. "Namun perilaku korupsi para pejabat semakin menjadi-jadi," ujarnya.

Diketahui, KPK melakukan dua OTT pada Rabu (4/2/2026). Pertama, menasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kedua, di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta. Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada 9-10 Januari 2026.

Parta melanjutkan, tindakan penindakan melalui OTT terhadap pejabat negara yang ber-

perilaku korup perlu dilakukan. Tujuannya agar ada efek jera bagi yang melanggar. "Selanjutnya harus dilakukan juga upaya pemiskinan terhadap pelaku," desak politikus PDIP ini.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menambahkan, OTT KPK menjadi bukti komitmen memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor perpajakan yang selama ini dikenal rawan penyimpangan. "Ini menunjukkan pengawasan dan penegakan hukum tetap berjalan," jelasnya.

Menurut Abdullah, praktik korupsi di sektor pajak masih terus berulang meskipun sejumlah oknum sebelumnya telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Tetapi tetap saja ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan. "Ini sangat memprihatinkan, apalagi mereka sudah mendapatkan fasilitas dan gaji yang tinggi dari negara," kata politikus PKB ini.

Selain itu, ia menyoroti KPK yang juga melakukan OTT terhadap pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait dugaan



Nyoman Parta

korupsi importasi. Sektor pajak dan bea cukai merupakan dua bidang strategis dan lahan basah yang sangat rawan praktik korupsi karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

Untuk itu, Abdullah mendorong KPK tidak hanya fokus pada operasi penindakan, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar celah korupsi dapat ditutup sejak awal. Pencegahan penting dilakukan agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi.

"Namun, jika masih ada yang nekat melakukan korupsi, maka harus ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera," tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) VI itu.

Sementara, anggota Komisi XI DPR Thoriq Majiddanor menilai, maraknya OTT KPK di sektor perpajakan dan kepabeanan menunjukkan mafia masih mengakar kuat dan belum tersentuh secara tuntas oleh reformasi sistem. Godaan uang haram yang sangat besar membuat oknum-oknum ini berani mengambil risiko.

Menurut Jiddan, persoalan berulangnya korupsi di sektor pajak tidak bisa dilepaskan dari lemahnya efek jera dalam penegakan hukum. "Penegakan hukum kita belum cukup keras dan belum benar-benar menimbulkan efek jera," tandasnya.

Jiddan menegaskan, selama celah-celah korupsi dalam sistem perpajakan dan kepabeanan tidak diberantas secara menyeluruh, praktik serupa akan terus beru-

lang. Selain itu, pegawai pajak selama ini telah menerima gaji dan tunjangan yang relatif tinggi. Sehingga alasan kesejahteraan tidak lagi relevan untuk membenarkan praktik korupsi.

"Sebagai gambaran, Kepala KPP Madya eselon II itu bisa mendapat tunjangan kinerja hingga Rp 81 juta, di luar gaji pokok," ungkap politikus Nasdem ini.

Karena itu, Jiddan menilai akar masalah korupsi di sektor pajak bukan semata soal kesejahteraan, melainkan integritas dan budaya birokrasi. Karena remunerasi tinggi ternyata tidak otomatis menghapus mental koruptif bila sistem dan budaya kerjanya tidak dibenahi.

Jiddan menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh. Mulai dari penguatan sistem pengawasan, reformasi budaya organisasi, hingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten. "Tanpa pembenahan sistem dan budaya secara serius, kita hanya akan menyaksikan OTT demi OTT tanpa pernah menyentuh akar persoalan," pungkasnya. ■ TIF